ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) DI KABUPATEN FAKFAK

Juniarti Wulandari Kafara[1], Ridha[2], Richard R.F Kabes[3]
ridha694ridha@gmail.com

[123]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract

This study analyzes the implementation of the Marine and Fishery Business Actor Card (KUSUKA) at the Marine and Fisheries Agency of Fakfak Regency. It employs a qualitative descriptive research design. Data sources include both primary and secondary data. The study involved 20 informants, comprising 13 extension officers from the Fakfak Regency Marine and Fisheries Agency and 7 fishermen. Data collection techniques included questionnaires, direct observation, and documentation review. The study utilized four indicators: 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, and 4) Bureaucratic Structure. The results indicate that enhancing the implementation of the KUSUKA card—facilitated by extension officers for key stakeholders in the marine and fisheries sector—requires effective collaboration between central and regional personnel based on their respective duties and functions. This collaboration ensures that the services provided to key stakeholders operate optimally and effectively. Furthermore, the bureaucratic structure—characterized by a direct working relationship between extension officers and the central authority—facilitates the smooth and effective issuance and production of KUSUKA cards for fishermen, who are the primary users of the system.
Keywords: Implementation, KUSUKA, Marine and Fisheries Agency

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari 13 pegawai penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan,Kabupaten Fakfak dan 7 orang Nelayan. Teknik pengumpulan data dengan pembagian kuesioner (angket), observasi langsung dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 4 indikator yaitu: 1.) Komunikasi 2.) Sumberdaya 3.) Disposisi 4.) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan implementasi atau penerapan kartu KUSUKA dari penyuluh terhadap pelaku utama sektor kelautan dan perikanan adanya kerjasama yang baik antara pegawai pusat dan daerah berdasarkan tupoksinya. Kerjasama ini membuat pelayanan yang di berikan kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan berjalan optimal dan sangat baik. Struktur birokrasi yaitu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerja sama secara langsung antara pihak penyuluh dengan pusat, membuat pengeluaran dan pembuatan kartu KUSUKA teruntuk para nelayan sebagai pengguna atau pelaku utama kartu KUSUKA berjalan lancar dan efektif.
Kata Kunci: Implementasi, KUSUKA, Dinas Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

Pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan adanya identifikasi terhadap profesi mereka ini bertujuan untuk memudahkan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga perlindungan, pemberdayaan, percepatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan maka perlu adanya inovasi, inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan adanya inovasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arif M. N. 2022). Menurut West & Far dalam Ancok (2012:34) Inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses,produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya,yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

Masa Pemerintahan sekarang sangat fokus dalam mewujudkan kualitas pelayanan, kesederhanaan dan juga kemudahan terhadap masyarakat dalam pelaksanaannya. Peningkatan pelayanan publik merupakan perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan, karena pelayanan publik merupakan hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) ataupun (*fundamental rights*) Eldo & Mutiarin (2018). Dengan hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan program kartu KUSUKA melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan perwujudan dari misi pemerintahan. Kartu KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian pembaruan dari program tersebut di atur sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya disebut Program Kartu Nelayan.

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah kartu yang digunakan sebagai identitas, basis data perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan serta sebagai sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementrian (Daniarsyah, D. 2020).

Mengacu pada Misi ke-4 (empat) Kepala Daerah Terpilih yaitu ”Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Daya Beli Masyarakat Serta Peningkatan Investasi Dengan Memanfaatkan Potensi Keunggulan Utama Daerah. Dari Misi ke-4 (empat) Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak untuk mengemban Misi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, antara lain :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Memperkuat Kelembagaan Pengelola Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
2. Meningkatkan Kapasitas Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan serta Memperkuat Akses Pemasaran
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan secara Terpadu dan Berkelanjutan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak yang termuat dalam Program dan Kegitannya saling berkaitan atau tersinkronisasi dengan Rencana Kerja Perikanan

Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat melalui Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).

Dinas Perikanan dan kelautan merupakan salah satu Institusi Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai Penyelenggara Pemerintah sudah menjadi kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan sangat berperan penting dalam rangka mendorong perkembangan Program dan Kegiatan Pembangunan melalui bidang Perikanan dan Kelautan sehingga sasaran yang merupakan Tolak Ukur dari Target Kinerja Dinas dapat tercapai.

Melihat akan pentingnya visi dan misi dijalankan maka salah satu Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan acuan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah Penyuluh Perikanan KKP RRI Khusus bagi Kabupaten FakFak kegitan yang berhubungan dengan Pembuatan Kartu KUSUKA dapat mendaftarakan diri pada Penyuluh di Dinas Kelautan dan perikanan Fakfak karena yang menjadi penyuluh adalah Pegawai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini telah mengeluarkan kartu KUSUKA sebanyak 346 Kartu Tahun 2022. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh dalam 1 bulan empat kali sosialisasi namun tidak berjalan secara efektif sebab sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan belum memiliki kartu KUSUKA.

Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu KUSUKA Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, penulis mengamati awal adanya beberapa masalah dalam proses implementasi yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian, yaitu masih kurang tahunya masyarakat tentang apa saja manfaat dari kartu KUSUKA yang mereka punya. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam menemukan alasan bagaimana implementasi kebijakan kartu KUSUKA di Kabupaten FakFak dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul " Analisis Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kartu Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan (KUSUKA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang Analisis Implementasi Kartu KUSUKA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas satu keadaan sejelas mungkin. sedangkan penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap subjek selanjutnya dianalisis (Denzin dan Lincoln, 2009:2). Tujuan pengelompokan data untuk membuat sistematika serta menyederhanakan data yang beragam menjadi satu kesatuan sesuai dengan harapan dalam tahapan analisis.

Populasi

Menurut Sugiyono (2011:61), Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak yang berjumlah 102 orang yang terdiri

dari 45 selaku Pegawai Negeri Sipil dan 57 Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Fakfak serta jumlah Nelayan yang berada di Kabupaten Fakfak berjumlah : 1.878 Nelayan (Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:62). Sedangkan menurut Arikunto (2010:109), Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu dan dana (biaya), Sempit atau luasnya wilayah penelitian dari subjek, karena hal ini menyangkut sedikit banyaknya data besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian yang resikonya besar tentu saja jika sampelnya besar, hasilnya akan lebih baik.

Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:138) *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Dalam penentuan sampel (informan) Pegawai pada Dinas Kelautahan dan Perikanan Kabupaten Fakfak peneliti mempertimbangkan hanya pada Petugas Penyuluh sebagai informan sebanyak 13 Orang. Sedangkan untuk menentukan sampel (informan) Nelayan peneliti menggunakan teknik *accidental sampling.* Menurut Nanang Martono (2014:80), *accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Maka peneliti menentukan sampel nelayan sebanyak 7 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Petugas Penyuluh	: 13 Orang
Nelayan	: 7 Orang
Jumlah	: 20 Orang

Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan berupa ungkapan, kata-kata. Data tersebut diproleh dari hasil wawancara, observasi, kuiesioner/angket dan beberapa sumber data yang terkait langsung dengan informan. Menurut. Sugiyono (2016: 14) Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Sumber data primer adalah Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan angket/kuesioner serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. Data Primer dalam Penelitian ini terdiri dari Petugas Penyuluh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Fakfak dan Nelayan Penerima Kartu KUSUKA.

Sumber Data berikutnya adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Adapun dokumen-dokumen maupun data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sendiri yang menjadi instrument atau alat penelitian, seperti yang ditulis oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2011:223) yang mengatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument

penelitian utama". Alasannya ialah bahwa, segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tida jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Observasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Menurut Anggito & Setiawan (2018:111) observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan indera sepertipen dengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan fakta- fakta peristiwa empiris. Artinya data diperoleh dengan cara memandang, melihat dan mengamati obyek, sehingga dengan itu peneliti memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan. Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan penelitian yang memahami. Angket atau kuesioner menurut Sugiyono (2014:230) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisiensi bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisa data secara Deskriptif Kualitatif. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2008:244), mengatakan bahwa : "Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain". Dalam penelitian ini teknik analisis data ada 3 cara yaitu:

Reduksi data (*Data Reduction*) Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14). Jadi, dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikas. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo 2012:244). Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman 1992:18). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian yang di lakukan pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Institusi Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagai Penyelenggara Pemerintah sudah menjadi kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Institusi Pemerintah yang sangat berperan penting dalam rangka mendorong perkembangan Program dan Kegiatan Pembangunan melalui bidang Perikanan dan Kelautan sehingga sasaran yang merupakan Tolak Ukur dari Target Kinerja Dinas dapat tercapai.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, akan diuraikan dan di sajikan dalam hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (KUSUKA) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Fakfak. melalui pembagian kuesioner langsung kepada 20 responden yang terdiri dari pegawai penyuluh dan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan yang bersedia dijadikan sampel pada penelitian, maka diperoleh data yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
Indikator Komunikasi		
1	Penyuluh telah memberikan informasi yang jelas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada para nelayan	45%
2	Penyuluh telah melakukan sosialisasi Kartu KUSUKA	20%
3	Memberikan informasi pembuatan Kartu KUSUKA mudah dipahami oleh nelayan	15%
Indikator Sumberdaya		
4	Petugas penyuluh mengerti dan memahami tugasnya	55%
5	Pelayan mempunyai semangat untuk memiliki kartu KUSUKA	50%
6	Penyuluh telah memiliki pengetahuan lebih tentang pembuatan Kartu KUSUKA	45%
Indikator Disposisi		
7	Penyuluh berperilaku Sopan terhadap Nelayan yang sedang mengurus pembuatan Kartu KUSUKA	10%
8	Penyuluh bertindak cepat dalam pelayanan pembuatan kartu KUSUKA	15%
9	Penyuluh melakukan pungutan dalam pembuatan Kartu KUSUKA	10%
Indikator Struktur Birokrasi		

10	Implementasi Kartu KUSUKA sudah sesuai dengan Struktur Organisasi	15%
11	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan Kartu KUSUKA	10%
12	Pimpinan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembuatan Kartu KUSUKA	15%

Sumber : Data Primer 2023

Hasil Pembahasan

Komunikasi

Penyuluh berperan penting dalam hal komunikasi untuk menyampaikan informasi tekait kartu KUSUKA kepada para nelayan sebagai pelaku utama penerima kartu KUSUKA. Dari hasil jawaban responden tentang penyuluh telah memberikan informasi yang jelas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada para nelayan dari jawaban Sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%, Setuju 9 orang responden atau 45%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10%, Tidak setuju sebanyak 5 orang responden atau 25 % dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang responden atau 10 %. Di lihat dari jawaban responden tersebut pada tabel 4.6 bahwa penyuluh cukup baik dalam menyampaikan informasi kepada nelayan. Dari hasil jawaban responden tentang penyuluh telah melakukan sosialisasi kartu KUSUKA kepada nelayan. sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10 %, Setuju 4 orang responden atau 20 %, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10 %, Tidak setuju sebanyak 1 orang responden atau 5 % dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang responden atau 55 %. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.7 Sehingga diketahui bahwa penyuluh tidak berhasil dalam melakukan sosialisasi Kartu KUSUKA terhadap para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan.karena salah satu faktor kurangnva jumlah pegawai pada penyuluh, maka sosialisasi tersebut dinyatakan masih gagal dan belum berhasil atau kurang maksimal dilakukan oleh Penyuluh terhadap nelayan.

Dari hasil jawaban responden tentang dalam memberikan informasi pembuatan Kartu KUSUKA mudah dipahami oleh nelayan. sangat setuju sebanyak 3 orang responden atau 15%, Setuju 3 orang responden atau 15%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10%, Tidak setuju sebanyak 3 orang responden atau 15% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 9 orang responden atau 45%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.8 bahwa penyuluh masi belum memberi informasi yang jelas kepada nelayan tentang kartu KUSUKA, maka dengan ini pemahaman tentang kartu kusuka belum dipahami dengan baik oleh para nelayan.

Sumberdaya

Sumberdaya manusia merupakan pokok utama dalam suatu pekerjaan maka dari itu apabila sumberdaya manusia (penyuluh) tidak berjalan dengan baik dalam penyuluhan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik dalam pembuatan kartu KUSUKA kepada Nelayan. Dari hasil jawaban responden tentang petugas penyuluh mengerti dan memahami tugasnya, terdapat pilihan jawaban sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%, Setuju 11 orang responden atau 55%, Kurang setuju sebanyak 1 Orang responden atau 5%, Tidak setuju sebanyak 1 orang responden atau 5% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 5 orang responden atau 25% . dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.9 Sehingga diketahui bahwa penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dilakukan cukup baik tentang pembuatan kartu KUSUKA.

Dari hasil jawaban responden tentang nelayan mempunyai semangat untuk memiliki kartu KUSUKA, Terdapat sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10 %, Setuju 10 orang responden atau 50 %, Kurang setuju sebanyak 1 Orang responden atau 5%, Tidak setuju sebanyak 3 orang responden atau 15% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 orang responden atau 20%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.10 diketahui bahwa nelayan sangat berantusias untuk memiliki kartu KUSUKA.

Dari hasil jawaban responden penyuluh telah memiliki pengetahuan lebih tentang pembuatan Kartu KUSUKA Terdapat jawaban sangat setuju sebanyak 3 orang responden atau 15%, Setuju 9 orang responden atau 45%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10%, Tidak setuju sebanyak 4 orang responden atau 20% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.11 diketahui bahwa penyuluh sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pembuatan kartu KUSUKA kepada nelayan.

Disposisi

Disposisi memiliki fungsi untuk mengetahui petunjuk atau tindakan cepat yang harus dilakukan oleh penyuluh dalam pembuatan kartu Kusuka kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan..

Dari hasil jawaban responden tentang Penyuluh berperilaku Sopan terhadap nelayan yang sedang mengurus pembuatan Kartu KUSUKA Terdapat jawaban sangat setuju sebanyak 10 orang responden atau 50%, Setuju 2 orang responden atau 20%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 20 %, Tidak setuju sebanyak 2 orang responden atau 20% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 orang responden atau 20%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.12 maka diketahui bahwa penyuluh memiliki sikap yang cukup baik dan sopan terhadap nelayan yang mengurus kartu KUSUKA.

Dari hasil jawaban responden tentang Penyuluh bertindak cepat dalam pelayanan pembuatan kartu KUSUKA Terdapat jawaban setuju sebanyak 4 orang responden atau 20%, Setuju 3 orang responden atau 15%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10%, Tidak setuju sebanyak 1 orang responden atau 5% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 10 orang responden atau 50%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.13 diketahui bahwa penyuluh dalam bertindak dalam pembuatan kartu KUSUKA belum cepat, karena dalam pengurusan kartu KUSUKA penyuluh masih bergantung adanya jaringan, apabila jaringan tidak berkendala maka pengurusan kartu KUSUKA dapat terselesaikan dengan
cepat.

Dari hasil jawaban responden tentang Penyuluh melakukan pungutan dalam pembuatan Kartu KUSUKA. Terdapat jawaban Sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau 20%, Setuju 2 orang responden atau 10%, Kurang setuju sebanyak 1 Orang responden atau 5%, Tidak setuju sebanyak 2 orang responden atau 10% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang responden atau 55%. Sehingga dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.14 diketahui bahwa pembuatan kartu KUSUKA tidak dipungut biyaya oleh penyuluh, dan pembuatan kartu KUSUKA dibuat oleh penyuluh secara
gratis.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerja sama secara langsung antara pihak penyuluh dengan pusat dalam mengeluarkan kartu KUSUKA dan pembuatan kartu KUSUKA teruntuk para nelayan sebagai pengguna atau pelaku utama kartu

KUSUKA. Dari hasil jawaban responden tentang Implementasi Kartu KUSUKA sudah sesuai dengan Struktur Organisasi Terdapat jawaban jawaban Sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau 20%, Setuju 3 orang responden atau 15%, Kurang setuju sebanyak 4 Orang responden atau 20%, Tidak setuju sebanyak 4 orang responden atau 20% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 5 orang responden atau 25%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.15 diketahui bahwa penyuluh dalam implementasi kartu KUSUKA belum sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi yang dibuat atau diatur dari pusat terhadap penyuluh perikanan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak.

Dari hasil jawaban responden tentang terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan Kartu KUSUKA**.** Terdapat jawaban Sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%, Setuju 2 orang responden atau 10%, Kurang setuju sebanyak 2 Orang responden atau 10%, Tidak setuju sebanyak 3 orang responden atau 15% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang responden atau 55%. Dilihat dari jawaban responden pada tabel 4.16 bahwa SOP atau standar operasional prosedur dalam pelayanan kartu KUSUKA tidak ada pada pelayanan pembuatan kartu KUSUKA oleh penyuluh.

Dari hasil jawaban responden tentang pimpinan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembuatan Kartu KUSUKA. Terdapat jawaban Sangat setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%, Setuju 3 orang responden atau 15%, Kurang setuju sebanyak 11 Orang responden atau 55%, Tidak setuju sebanyak 2 orang responden atau 5% dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang responden atau 10%. Dari dari jawaban responden pada tabel 4.17 Sehingga diketahui bahwa pimpinan jarang dalam mengawasi penyuluh dalam pelaksanaan pembuatan kartu KUSUKA.

Kesimpulan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh belum terlaksanakan secara optimal serta informasi yang diberikan kurang jelas, dan pada pelayanan yang di berikan dalam membuat kartu KUSUKA bagi nelayan juga tidak dilakukan secara baik, hal ini di buktikan dengan adanya keluhan dari para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan terkait proses pengurusan kartu KUSUKA. Terkhususnya sumberdaya manusia pada penyuluh masih kurangnya tenaga manusia dalam hal ini penyuluhan yang dilakukan jarang terhadap pelaku utama sektor kelautan dan perikanan/nelayan karena kurangnya pegawai penyuluh mengakibatkan sebagian besar nelayan belum tahu mengenai adanya kartu KUSUKA. Kurangnya tindakan atau sigap yang tepat dari penyuluh terhadap para pelaku utama kelautan dan perikanan/nelayan yang mengurus kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya pada bagian penyuluh. Dalam proses pelayanan kartu KUSUKA, belum adanya kerjasama yang baik antara pegawai penyuluh sehingga pelayanan yang di berikan kepada pelaku utama sektor keelautan dan perikanan/nelayan kurang optimal. Selain itu, pengawasan yang di lakukan oleh pimpinan langsung kurang optimal, hal ini menyebabkan kelalaian pegawai dalam melaksanakan tupoksinya. 4. Kepada Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan bertindak cepat dalam melakukan evaluasi terhadap pegawai penyuluh, serta pimpinan turut dalam pengawasan pada penyuluhan agar berjalan secara optimal dan sesuai dengan tupoksinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin. (2012). *Psikologi kepemimpinan dan inovasi.* Jakarta : Erlangga.

Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta : Ar-ruzzmedia

Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak

Arif, M. N. (2022). Implementation Of The Marine And Fisheries Business Actors Card Policy In Sorong Regency *(Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Daniarsyah, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *3*(2).

Denzin, Norman K., Yvona S. Lincoln (2009), *Handbook of Qualitative Research Edisi Bahasa Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan "Kumis MbahTejo" di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156–167.

Martono, Nanang. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications*

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung*: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Izin

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri
Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/Permen-KP/2016 Tentang Kartu Nelayan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya disebut Program Kartu Nelayan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tentang pelayanan Publik